

PERAN GROUP OF TWENTY (G20) DALAM MENDORONG KEUANGAN INKLUSIF (FINANCIAL INCLUSION) DI NEGARA BERKEMBANG (2009-2017): PERSPEKTIF STRUKTURALISME

Sahela Sabila

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia
sahela.sabila@ui.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkritisi peran yang dilakukan oleh G20 dalam mendorong keuangan inklusif sebagai agenda di negara berkembang. Perspektif yang digunakan adalah strukturalisme. Strukturalisme dipakai dalam melihat agenda keuangan inklusif sebagai ide liberalisme yang digunakan oleh institusi atau negara maju dalam membentuk struktur internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa agenda keuangan inklusif merupakan agenda yang digunakan oleh negara maju dalam mempertahankan struktur internasional antara negara core dan periphery. Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa agenda keuangan inklusif adalah agenda yang menyebarkan paham liberalisme, terutama dalam industri keuangan. Pihak yang diuntungkan dari agenda tersebut adalah lembaga jasa keuangan formal.

Kata kunci: G20, Keuangan Inklusif, Negara Maju, Negara Berkembang, Industri Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

G20 merupakan forum utama untuk kerja sama internasional mengenai isu-isu penting dalam agenda ekonomi dan keuangan global. Tujuan dari G20 meliputi, (1) Koordinasi kebijakan antar anggotanya dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi global, pertumbuhan yang berkelanjutan; (2) Mempromosikan

kebijakan keuangan untuk mengurangi resiko dan mencegah krisis keuangan di masa depan; dan (3) Modernisasi arsitektur keuangan internasional (G20foundation, 2017).

Didirikannya G20 bermula pada September 1999. Pada saat itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari G7 (Group of Seven) mengumumkan

perhatiannya kepada “perluasan dialog terhadap isu kebijakan ekonomi dan finansial antara signifikansi ekonomi yang sistematis dan mempromosikan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil dan berkelanjutan yang dapat menguntungkan semua pihak (G20Toronto, 2017). Pertemuan tersebut diadakan pasca Krisis Keuangan 1997-1998. Diungkapkan bahwa adanya kerentanan sistem keuangan internasional dalam konteks globalisasi ekonomi dan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang utama saja tidak cukup terlibat dalam diskusi dan keputusan mengenai masalah ekonomi global (G20foundation, 2017).

G20 terdiri dari negara anggota G7, 12 negara penting dalam pembangunan ekonomi-politik global, dan Uni Eropa (Alexander, Loschmann, dan Schule, 2016). Negara anggota berjumlah 19, yang meliputi Argentina, Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, Jerman, India, Indonesia, Italia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Tiongkok, Afrika Selatan, Turki, dan Uni Eropa. Pada awal pertemuan, G20 dihadiri pada level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, kemudian pada 2008 berkembang pada level Kepala

Negara (G20Toronto, 2017). Hal yang menarik dalam keanggotaan G20 adalah diikutsertakan negara berkembang sebagai perwakilan perekonomian global. Keberadaan berkembang ini merupakan hal yang menarik, melihat berdasarkan berdirinya G20 sebagai respon terhadap Krisis Finansial Asia 1997-1998 yang berdampak terhadap beberapa negara berkembang.

Keuangan inklusif merupakan sebuah isu pertumbuhan untuk pembuatan kebijakan terhadap tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan mencapai kesejahteraan. Pada saat yang sama, adanya krisis finansial global menjadikan respon terhadap adanya jasa keuangan. Pada 2008-2009, G20 bergerak untuk berperan dalam arsitektur keuangan internasional. Hal ini menumbuhkan dua kebijakan prioritas, yaitu financial inclusion dan responsible finance. Hal ini dilakukan supaya G20 dapat menjadi badan internasional yang penting. Keuangan inklusif merupakan salah satu pilar dalam agenda pembangunan G20. Pertemuan G20 menyepakati bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi yang luas dan inklusif adalah akses terhadap jasa keuangan seperti rekening bank, lembaga

tabungan, jalur pembayaran formal, dan layanan asuransi (CGAP, 2018).

Hal yang perlu dilihat adalah bahwa keuangan inklusif merupakan isu yang lebih penting bagi negara berkembang, dan juga diakui oleh negara maju sebagai tujuan prioritas dalam upaya koordinasi regulasi internasional. Namun, pengaruh negara berkembang yang dilakukan dalam mendefinisikan agenda reformasi regulasi yang mempertimbangkan keuangan inklusif terbatas (de Sousa, 2016: 257).

Melihat adanya agenda tersebut, penelitian ini berfokus kepada dorongan yang dilakukan oleh G20 terhadap keuangan inklusif di negara berkembang. Kemudian penelitian ini mengkritisi apakah keuangan inklusif dapat menguntungkan bagi negara berkembang. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu “Mengapa G20 mendorong agenda keuangan inklusif bagi negara berkembang?”

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Strukturalisme

untuk membantu penulis dalam menjelaskan keuangan inklusif.

Strukturalisme

Strukturalisme berawal dari pemikiran Karl Marx. Dalam analisis Marx, kapitalisme memiliki dua peran, yaitu, pertama, melunturkan perbudakan dan feodalisme, dan kedua membuat fondasi ekonomi dan sosial untuk transisi pembangunan yang lebih tinggi. Marx melihat adanya sebuah sistem pasar, hubungan antara pekerja yang memproduksi barang juga konsumen yang membeli barang. Pemilik modal akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan pasar dengan melakukan efisiensi, penggunaan teknologi dan pengurangan upah pekerja. Kaum pekerja terpaksa menerima upah yang rendah. Hal ini membuat pekerja sulit untuk membeli kebutuhannya. Marx melihat ini sebagai sebuah kompetisi antara borjuis dan proletar yang bersifat negativesum. Pandangan Marx ini digunakan kepada pendekatan ekonomi strukturalis, karena melihat hubungan ekonomi yang berpengaruh kepada hubungan masyarakat. Vladimir Lenin meneruskan ide kapitalisme Marx menjadi ide mengenai imperialisme dan kolonialisasi. Negara

dalam sistem kompetisi mencari sumber produksi dan makanan dengan kompetisi. Hal tersebut akan menghasilkan sistem monopoli pasar yang akan dikompetisikan oleh negara. Di bawah kepemimpinan Lenin, Rusia berpisah dengan negara Eropa lainnya yang menganut sistem kapitalis, dan membuat sistem komunis yang bebas dari pertarungan antar kelas dan perang imperialis. Hal yang harus digaris bawahi dari Lenin adalah, imperialisme, menjaga negara yang miskin tergantung kepada negara yang maju, dan hubungan ini dijaga untuk menghindar krisis (Balaam & Veseth, 2008).

Variasi lainnya dari strukturalisme adalah konsep dependensi atau ketergantungan, yang membedakan antar negara menjadi utara dan selatan. Dependency School atau dependencia merupakan pemahaman yang lahir di Amerika Latin. perspektif ini lahir dikarenakan adanya pandangan bahwa teori ekonomi tidak memperdeksi apa yang terjadi, yaitu kesenjangan yang membuat dunia terbagi menjadi core dan periphery (McKay, 2008: 62).

Kemudian berkembanglah pemahaman yang mengkritisi adanya insitusi internasional. Peter Gowan (1999)

berargumentasi bahwa globalisasi yang terjadi bukanlah untuk perubahan ekonomi atau teknologi, melainkan strategi politik dari negara maju untuk tetap menjadi dominan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca runtuhnya rezim BWS 1970, yang berusaha untuk membangun rezim Dollar-Wall Street Regime (DWSR) dengan menggunakan standar Dollas AS. Strategi ini kemudian membuat rezim dollar yang membuat negara-negara mengadopsi sistem neo-liberal. Hal ini juga terlihat pada Krisis Keuangan Asia 1997-1998, ketika IMF dan G7 membuat paket kebijakan sebagai alternatif dan membuat kebijakan yang neo-liberal sehingga berdampak kepada masuknya perusahaan asing (Callinicos, 2002: 259). Organisasi internasional seperti G7, PBB, IMF, WTO, NATO menjadi area untuk AS agar memiliki kekuatan dalam tujuan politiknya. Hasilnya adalah konflik ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kapitalisme global (Callinicos, 2002: 263). Banyak kaum strukturalis yang melihat bahwa institusi keuangan merupakan “front” bagi AS untuk tujuan mengeksploitasi negara peripheri seperti Asia Tenggara dan Amerika Latin (Balaam dan Veseth, 2008: 98).

Perspektif strukturalis ini digunakan untuk melihat bagaimana agenda keuangan inklusif oleh negara maju. Jika dilihat lagi, agenda ini bukan merupakan prioritas bagi negara maju, lalu mengapa mereka memberikan bantuan terhadap negara berkembang. Unsur apa yang kemudian menggerakkan negara maju memberikan bantuan tersebut. Strukturalis mencoba melihat lebih kritis realitas yang ada, tidak seperti liberalis yang melihat secara positif, sehingga perspektif ini digunakan untuk mengkritisi agenda keuangan inklusif. Strukturalis melihat bagaimana upaya memperluas pasar yang dilakukan organisasi atau negara tersentu. Apabila memang keuangan inklusif memiliki dampak terhadap perluasan pasar, terutama perbankan, maka strukturalis dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Selain itu pemahaman mengenai ketergantungan antara negara maju dan berkembang digunakan untuk melihat bagaimana ketergantungan dari negara berkembang terhadap dorongan yang diberikan oleh negara maju untuk program agenda keuangan inklusif.

PEMBAHASAN

Liberalisasi Industri Keuangan Melalui Agenda Keuangan Inklusif: Upaya Melanggengkan Negara Core

Bagian ini merefleksikan pemahaman yang dibangun oleh G20 dalam mendorong agenda keuangan bagi negara berkembang dari sudut pandang liberalisme. Dengan paham liberal melalui argumentasi pembangunan ekonomi, keuangan inklusif didorong oleh institusi internasional seperti G20. Tiga argumentasi mengenai dampak positif dari keuangan inklusif meliputi, pemberantasan kemiskinan, menciptakan stabilitas keuangan, dan upaya pengawasan.

Dalam perspektif strukturalisme, agenda internasional adalah struktur yang digunakan oleh negara core atau maju dan institusi internasional untuk menyebarkan ide-ide liberalisme terhadap negara periphery atau dalam pembahasan ini negara berkembang. Berangkat dari pemahaman tersebut, bagian ini mengkritisi agenda keuangan inklusif tersebut. Pertama, dengan adanya keuangan inklusif khususnya dalam indikator pinjaman, sebagai upaya pemberantasan kemiskinan, tidak semua masyarakat miskin dapat memanfaatkan pinjaman yang mereka dapat dari pinjaman

tersebut. Apabila mereka tidak dapat memanfaatkan pinjaman sebagai modal usaha, justru tidak dapat menyelamatkan mereka dari jurang kemiskinan. Hal ini justru dapat melanggengkan kemiskinan di negara berkembang atau tertinggal, sehingga struktur antar negara tetap akan tetap bertahan dalam integritas core dan periphery. Kedua, apabila dikatakan bahwa keuangan inklusif dapat menjadi alat bagi stabilitas keuangan dengan banyaknya disverifikasi perbankan, justru dengan perluasan pinjaman kepada masyarakat miskin yang tidak produktif justru akan meningkatkan Non-performing Loan (NPL) di suatu negara.

Kritik Keuangan Inklusif Terhadap Pemberantasan Kemiskinan

Pada bagian sebelumnya disebutkan mengenai ide keuangan inklusif sebagai upaya memberantas kemiskinan. Namun, apakah perluasan jasa keuangan dapat membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan? Apakah akses jasa keuangan formal merupakan jalan utama bagi negara berkembang untuk mengurangi angka kemiskinan? Penulis melihat bahwa perluasan akses jasa keuangan formal khususnya pinjaman bukan merupakan hal yang positif bagi masyarakat miskin.

Sebelum membahas mengenai kritik terhadap keuangan inklusif, hal pertama yang harus dipahami adalah lembaga jasa keuangan formal. Dalam agenda keuangan inklusif, lembaga jasa keuangan formal mengarah kepada lembaga microfinance atau lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro ini yang kemudian memberikan produk keuangan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya, bagaimana peran keuangan mikro tersebut dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin, apakah tujuan untuk mengurangi kemiskinan dapat tercapai.

Jason Hickel (2015) menggambarkan secara sederhana mengenai pinjaman dan konsumsi. Hickel menjelaskan bahwa adanya pinjaman mikro yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro tidak membuat kemiskinan berakhir, malah dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Kondisi buruk tersebut dikarenakan pinjaman keuangan mikro yang dipinjam oleh masyarakat miskin bukan untuk usaha, tetapi digunakan untuk bertahan hidup. Bagi masyarakat miskin, yang masih sulit untuk membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan hidupnya tidak memikirkan dana untuk usaha. Hickel menggambarkan contoh di Afrika Selatan, yang menggunakan pinjaman mikro untuk

konsumsi 94%. Hal ini mengakibatkan uang dipinjam digunakan untuk usaha hanya digunakan untuk konsumsi. Ketika mereka tidak dapat membayar kembali uang yang dipinjam, mereka akan membuat pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang lama. Hal lainnya apabila mereka dapat mengembangkan usaha atau bisnis dengan basis pinjaman. Ketika bisnis mereka berhasil hal positif tentunya. Namun, bagaimana ketika bisnis mereka gagal? Yang terjadi adalah mereka terjat dalam lingkaran hutang (Hickel, 2015). Penjelasan Hickel ini memberikan gambaran bahwa adanya agenda keuangan inklusif tersebut justru malah membuat kemiskinan malah bertahan. Masyarakat miskin yang terjat kemiskinan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apabila mereka mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan dan tidak dapat membayarnya kembali, hanya memasukkan mereka ke dalam lingkaran hutang.

Selain itu, apakah keuangan inklusif merupakan agenda yang menjadi prioritas negara maju dalam mengurangi kemiskinan di negara berkembang? Milford Bateman (2010) menjelaskan bahwa pinjaman keuangan mikro merupakan salah satu alat politik yang

digunakan oleh Amerika Serikat di Amerika Latin. Bateman menggambarkan bahwa Amerika Serikat menjadikan isu keuangan mikro sebagai tanggungjawabnya dalam pembangunan ekonomi di Amerika Latin yang rendah biaya. Mengapa rendah biaya? Karena tanggung jawab yang diberikan Amerika Serikat dalam bentuk dorongan melakukan pinjaman kredit mikro tidak memerlukan dana yang besar (Bateman, 2010). Hal ini terkait dengan agenda pembangunan yang selalu menuntut komitmen pembagian beban dari G7 (Virgianita, 2013). Terlihat bahwa negara maju seperti Amerika Serikat tidak ingin terbebani dengan agenda pembangunan kepada negara berkembang.

Namun dalam tanggung jawabnya terhadap kemiskinan, Amerika Serikat tidak perlu memikirkannya. Logikanya adalah ketika mereka meminjam uang untuk usaha namun usahanya tidak berkembang, maka itu bukan merupakan kesalahan Amerika Serikat karena tidak dapat mengembangkan usahanya, tetapi merupakan kesalahan individu yang meminjam uang untuk usaha tapi tidak dapat mengembangkan usahanya, sehingga akan tetap miskin (Bateman, 2010).

Uraian di atas menggambarkan bahwa agenda keuangan inklusif bukan merupakan isu pembangunan internasional yang didorong oleh negara maju bagi negara berkembang. Dengan menggunakan isu keuangan inklusif sebagai agenda pembangunan untuk negara berkembang, merupakan usaha bagi negara maju untuk memberikan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan internasional. Selain itu adanya pencapaian keuangan inklusif dalam bentuk pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan, malah dapat melanggengkan kemiskinan tersebut. Dalam perspektif strukturalisme, dapat dilihat bahwa agenda tersebut dapat melanggengkan struktur internasional berdasarkan core dan periphery. Dengan menggunakan argumentasi membentuk struktur keuangan global dengan keuangan inklusif sebagai caranya, justru membuat kemiskinan di negara berkembang tidak membaik atau hanya bertahan.

Kritik Terhadap Stabilitas Keuangan

Terdapat beberapa kritik yang menjelaskan hubungan antara keuangan inklusif dengan stabilitas keuangan. Chiwira, Tadu, dan Muyambiri (2013) menjelaskan bagaimana menjembatani

antara keuangan inklusif dengan stabilitas keuangan. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam menjaga stabilitas keuangan adalah regulasi keuangan. Keuangan inklusif dapat berpengaruh terhadap sistem keuangan dengan peran sebagai regulasi keuangan. Melalui regulasi keuangan tersebut, maka menjadikan keuangan inklusif dapat mengarah kepada stabilitas keuangan (Chiwira, Tadu, & Muyambiri, 2013). Selain itu, Khan (2011) menjelaskan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa pencapaian keuangan inklusif dan stabilitas keuangan bukan merupakan pilihan kebijakan tetapi dorongan kebijakan. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mencapai tujuan keuangan inklusif, yaitu menyediakan fasilitas keuangan dasar untuk segmen masyarakat yang lebih luas sambil memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan tidak terganggu. Namun Khan juga menjelaskan bahwa keuangan inklusif memiliki dampak negatif bagi stabilitas keuangan. Hal ini dikarenakan agenda keuangan inklusif berusaha untuk menurunkan standart kredit untuk menjangkau masyarakat bankable dengan menurunkan persyaratan pinjaman, yang dapat menyebabkan instabilitas

dengan regulasi yang tidak matang oleh lembaga seperti microfinance (Khan, 2011). Dengan adanya perluasan akses seperti pinjaman atau kredit kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila pengawasan terhadap standarisasi kredit kurang baik, justru akan menyebabkan ketidakstabilan keuangan.

Ketidakstabilan keuangan ini dapat dilihat dari Krisis Keuangan Global 2008. Salah satu penyebab krisis adalah kelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat. Longgarnya kebijakan tersebut kemudian didorong oleh kebijakan Pemerintah yang mendorong program kepemilikan rumah. Kondisi tersebut menyebabkan harga perumahan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut semakin mendorong bank untuk mengucurkan kredit perumahan secara agresif. Hal yang terjadi adalah penurunan standarisasi atau persyaratan dalam penyaluran kredit perumahan (Bank Indonesia, 2009). Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk atau belum memiliki riwayat kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang memiliki resiko tinggi (Detik Finance,

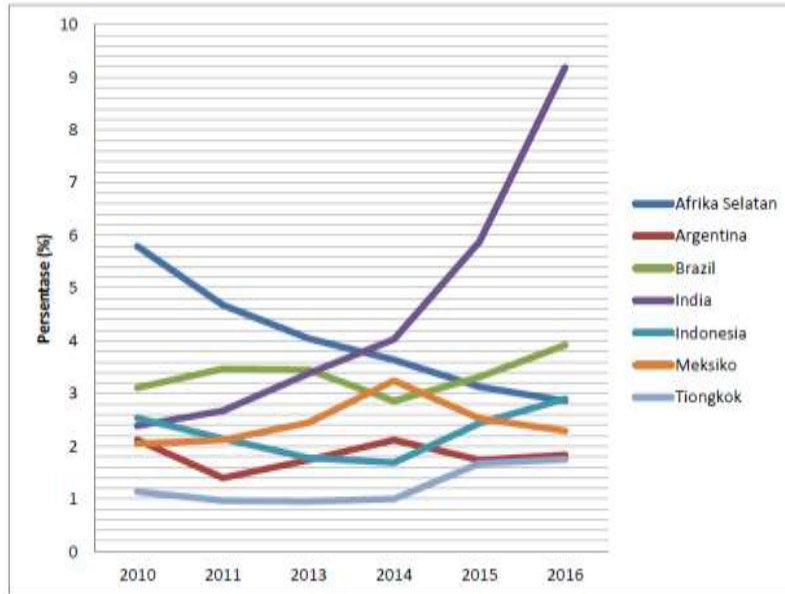
2009). Krisis tersebut memperlihatkan bahwa perluasan keuangan inklusif, khususnya pinjaman kredit tidak selalu positif bagi stabilitas keuangan. Namun hal yang perlu diperhatikan dengan pengalaman krisis keuangan 2008, adalah krisis tersebut terjadi karena pinjaman yang diberikan untuk pembelian perumahan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari keuangan inklusif merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini tidak terlepas dari Krisis Keuangan Global 2008. Apabila dilihat dari timeline agenda keuangan inklusif sendiri, dimulai pada pertemuan tahun 2009, pasca krisis terjadi. Hal utama yang diharapkan dari keuangan inklusif adalah diservikasi perbankan yang membuat aset bank menjadi lebih beragam. Dengan aset yang beragam diharapkan bank tidak kehilangan asetnya apabila banyak nasabah yang menarik uangnya. Secara kritis, keuangan inklusif tidak selalu berkaitan dengan stabilitas keuangan. Dari sisi pinjaman, perluasan akses dapat membuat dampak yang negatif. Karena apabila banyaknya pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang tidak produktif akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan.

Salah satu studi mengenai keuangan inklusif dan stabilitas ekonomi, Dienillah dan Anggraeni (2016) menjelaskan dengan mengkomparasi bagaimana keuangan inklusif di tujuh negara Asia, yaitu, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia, India, Bangladesh, dan Turki. Dengan indikator non-performing loan¹ (NPL) Korea Selatan memiliki sistem keuangan yang paling stabil karena rendahnya NPL terhadap GDP. Sedangkan Bangladesh memiliki stabilitas keuangan paling rendah karena ketidakefisien manajemen di sektor perbankan karena kredit yang masih buruk, terutama di bidang kredit mikro dan pertanian (Dienillah & Anggraeni, 2016).

Terkait dengan pinjaman, pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa pinjaman bukan merupakan kebutuhan bagi masyarakat miskin. Kemudian dalam kaitannya dengan stabilitas keuangan, keuangan inklusif diharapkan baik karena adanya disverifikasi. Pada paragraf sebelumnya dibahas bahwa pemberian pinjaman kepada masyarakat dapat membuat keuangan tidak stabil. Penulis menggambarkan dengan indikator Non-Performing Loan (NPL). Indikator NPL digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat tidak selalu digunakan untuk kegiatan yang produktif.

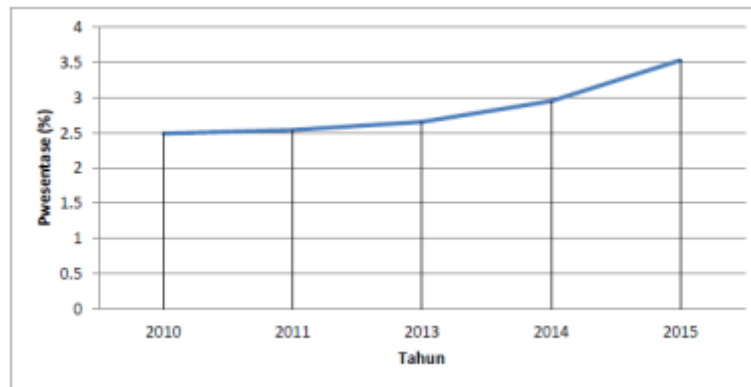
Grafik 1. NPL di negara berkembang anggota G20



(Sumber: World Bank)

Sedangkan apabila diambil dengan rata-rata:

Grafik 2. Rata-rata NPL di negara berkembang anggota G20



(Sumber: diolah oleh Penulis dari data World Bank)

Dari data tersebut dengan diambil secara rata-rata menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh masyarakat

bukan merupakan hal yang positif untuk melakukan usaha yang produktif.

Di India misalnya, India merupakan negara yang berfokus dengan upaya peningkatan keuangan inklusif dan meliberalisasi pasar perbankan, namun dari data di atas memperlihatkan bahwa India memiliki pencapaian yang paling tinggi dibandingkan negara anggota G20 lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian keuangan inklusif tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan, terutama dalam indikator pinjaman.

Penguatan Pasar

Pasar jasa keuangan berbeda dengan pasar untuk jasa atau produk lainnya. Contohnya seperti masalah mengenai pasar kredit, yang berbeda dengan pasar seperti, misalnya permen karet. Salah satu prinsip ekonomi yang mendasar adalah mengenai keseimbangan (*equilibrium*) pasar, di mana ketersediaan (*supply*) sama dengan permintaan (*demand*). Apabila permintaan permen karet lebih dari ketersediaan maka harganya akan naik sampai terjadinya keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan, sehingga akan membentuk harga keseimbangan. Apabila harganya terlalu tinggi, sehingga konsumen tidak

dapat membelinya, maka tidak akan dibeli oleh konsumen. Namun konsumen yang ingin dan dapat membelinya, akan membelinya. Sehingga apabila fungsi harga berjalan dengan harapan, tidak terdapat masalah (World Bank, 2018).

Stiglitz dan Weiss (1981) menjelaskan mengenai bedanya pasar keuangan, terutama pasar kredit dan asuransi. Dijelaskan bahwa masalah informasi dapat menyebabkan penjatahan dan eskresi kredit dari pasar keuangan bahkan dalam keadaan keseimbangan. Pasar kredit dan asuransi dikarakteristikan oleh masalah agen utama yang serius, yang meliputi seleksi terbalik (fakta bahwa para peminjam kurang serius untuk membayar kembali pinjaman lebih bersedia untuk mencari keuangan eksternal) dan bahaya moral (setelah pinjaman diterima, peminjam dapat menggunakan dana dengan cara yang tidak konsisten dengan kepentingan pemberi pinjaman). Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan pengguna yang dikeluarkan secara tidak sengaja, seseorang harus membedakan antara individu yang menghadapi hambatan harga dan eskresi keuangan yang timbul karena risiko idiosinkratik yang tinggi atau kualitas proyek yang buruk dan orang-orang yang menghadapi hambatan

tersebut karena ketidaksempurnaan pasar seperti informasi asimetris (World Bank, 2018).

Rationing dapat muncul di pasar kredit yang kompetitif karena suku bunga dan biaya bank tidak hanya mempengaruhi permintaan, tetapi juga profil risiko dari nasabah bank: suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik peminjam berisiko (seleksi terbalik) dan mengubah insentif pembayaran (moral hazard). Ini berarti bahwa pengecualian keuangan akan bertahan bahkan pada keseimbangan pasar. Apabila bank menghadapi kelebihan permintaan kredit, bank akan menolak pinjaman kepada peminjam yang secara observasi tidak dapat dibedakan dari mereka yang menerima pinjaman. Para peminjam yang ditolak tidak akan menerima pinjaman, walaupun mereka menawarkan untuk membayar tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka ditolak aksesnya. Dengan kata lain, mereka yang mungkin bankable (yang layak, pada prinsipnya dalam jasa keuangan), tetapi secara tidak langsung terbatas untuk mendapatkan akses (World Bank, 2018).

Dari segi ketersediaan, rendahnya keuangan inklusif terjadi karena

penawaran di pasar keuangan yang terbatas di bawah kuantitas yang dibutuhkan oleh pasar. Kondisi seperti ini yang kemudian dapat merugikan bagi masyarakat miskin dalam perebutan komoditas. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan pasar masyarakat kecil bukanlah pasar yang menjanjikan bagi lembaga jasa keuangan, dan kemudian membuat masyarakat miskin sulit untuk mendapatkan jasa keuangan. Untuk itu dibutuhkannya dorongan bagi lembaga keuangan untuk memberikan jasa keuangan bagi seluruh layanan masyarakat (Wahid, 2014). Penyediaan jasa keuangan masyarakat perlu dorongan khusus untuk dapat menyediakan produk-produk keuangan bagi masyarakat miskin. Misalnya produk-produk yang terjangkau, seperti tabungan dan pinjaman yang rendah bunga dan biaya administrasi. Untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat miskin dengan standart bagi kalangan ekonomi menengah keatas. Disini lah pentingnya keuangan inklusif bagi ketersediaan terhadap pendistribusian jasa keuangan, dengan menyediakan jasa-jasa yang tepat bagi masyarakat miskin.

Bagan 1. Ilustrasi Keuangan Inklusif terhadap Penawaran dan Permintaan



(Sumber: diolah oleh penulis)

Dari segi permintaan, dititikberatkan kepada kesadaran masyarakat dan seberapa besar permintaan masyarakat terhadap jasa keuangan. Permintaan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat. Poin yang harus didorong dari keuangan inklusif adalah peningkatan dan pemahaman serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Dari segi tabungan misalnya, dorongan kesadaran masyarakat diharapkan tercipta seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Dengan peningkatan kesejahteraan, masyarakat yang mulai mengalami peningkatan penghasilan akan menyimpan dananya kepada lembaga keuangan, dan dapat berdampak seperti investasi misalnya. Dari sisi kredit, masyarakat dapat didorong untuk mendapatkan dana atau aset tambahan dalam berbagai bentuk untuk menunjang aktifitas ekonominya, seperti

usaha atau bisnis yang dilakukannya (Wahid, 2014).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif merupakan jembatan bagi pasar keuangan. Dari sisi lembaga jasa keuangan dituntut untuk dapat menyediakan berbagai produk keuangan yang pas untuk berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, lembaga jasa keuangan juga didorong agar tidak membatasi perluasan akses, tidak hanya tabungan dan simpanan saja, tetapi meluas kepada simpanan. Karena permasalahan yang ada adalah lembaga jasa keuangan memiliki keengganan untuk memberikan pinjaman (dengan beberapa faktor). Dari sisi konsumen, keuangan inklusif diarahkan kepada kesadaran akan manfaat keuangan inklusif untuk mendorong aktifitas ekonomi dan usahanya.

KESIMPULAN

Penulis melihat bahwa keuangan inklusif ini merupakan agenda yang didorong oleh negara maju dalam menciptakan struktur keuangan global. Keuangan inklusif sudah ada sejak lama. Dalam pencapaiannya, antara negara maju dan negara berkembang berbeda. Dengan pengukuran kepemilikan akun di jasa keuangan formal, negara maju sudah memiliki pencapaian yang tinggi, sedangkan negara berkembang masih rendah. Dengan pencapaian yang tinggi, negara maju sudah mengembangkan jasa keuangan lebih luas, sedangkan negara berkembang masih memiliki tugas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Namun, pada saat ini negara berkembang sudah mulai untuk meningkatkan pencapaian keuangan inklusifnya.

Peningkatan keuangan inklusif di negara berkembang tidak terlepas dari peran aktor internasional. Agenda ini merupakan agenda internasional yang didorong oleh lembaga seperti G20. G20 sendiri mulai mendorong agenda keuangan inklusif sejak 2009. Terkait dengan keputusan G20 sebagai global policy forum yang keputusannya memang tidak

mengikat dan hanya menganjurkan kepada negara lain, penulis melihat adanya agenda keuangan inklusif yang dibahas oleh G20 memiliki pengaruh kepada negara berkembang dengan membangun komitmen dan membuat strategi nasional di setiap negara. G20 mendorong keuangan inklusif di negara berkembang dengan mendorong sebagai prioritas kebijakan. Terlihat bahwa G20 berupaya agar negara berkembang memiliki komitmen politik yang kuat untuk agenda tersebut. Komitmen politik yang kuat terangkum dalam poin kepemimpinan agenda keuangan inklusif G20. Kepemimpinan berarti, isu tersebut tidak terlepas dari peran pemimpin, Pemerintah, dan pengambil kebijakan untuk mendorong agenda tersebut di negaranya. Penulis melihat bahwa negara berkembang menjadi berkomitmen dengan agenda ini.

Sebagaimana penjelasan pada isi penelitian ini, yang menjawab pertanyaan “mengapa G20 mendorong agenda keuangan inklusif bagi negara berkembang?” Pertama, keuangan inklusif kuat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat miskin akan akses terhadap jasa keuangan formal menjadi kesempatan mereka untuk

memperbaiki kualitas hidupnya. Keuntungan tersebut dimulai dari akses terhadap jasa keuangan, kemudian mengarah kepada jasa lainnya, simpanan, pinjaman, pengiriman uang, asuransi, dan pensiun. Secara kritis, upaya pembangunan dan mengurangi kemiskinan ini tidak terjadi. Justru masyarakat miskin yang terbiasa meminjam uang di lembaga keuangan formal akan menjadi tergantung.

Kemudian penulis melihat tujuan dari keuangan inklusif adalah stabilitas keuangan. Dalam kaitannya dengan stabilitas keuangan, perlu dilihat bahwa keuangan inklusif menjadi foras G20 pasca krisis keuangan global 2008. Sesuai tujuannya G20 sebagai koordinasi kebijakan antar anggotanya dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi global, pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan keuangan untuk mengurangi resiko dan mencegah krisis keuangan di masa depan, G20 menjadikan keuangan inklusif untuk mencegah ketidakstabilan keuangan. Dengan adanya keuangan inklusif yang memperluas akses jasa keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, maka lembaga keuangan akan mendapatkan aset lebih banyak. Aset tersebut dapat menjadikan disverifikasi karena sumber aset bank lebih

banyak, maka stabilitas keuangan akan lebih terjaga.

Pada kerangka pemikiran, dijelaskan mengenai strukturalis yang melihat bahwa hubungan ekonomi global dirancang sedemikian rupa agar dapat menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu. Secara mendalam, penulis melihat bahwa agenda keuangan inklusif ini merupakan bagian kepentingan dari lembaga jasa keuangan. Bagi lembaga jasa keuangan formal seperti bank dan lembaga mikro, adanya keuangan inklusif dapat mendorong untuk menyediakan berbagai produk jasa keuangan bagi berbagai masyarakat. Hal ini merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut, semakin banyak nasabah, semakin banyak produk, dan semakin banyak peluang bisnis yang dapat dijalankan oleh bank. Selain itu, dorongan akan infrastruktur perbankan seperti ATM dapat menjadi keuntungan karena lembaga jasa keuangan dapat lebih melakukan efisiensi operasional. Terlihat bahwa lembaga jasa keuangan yang memiliki keuntungan dalam agenda tersebut.

REFERENSI

- Balaam, D. N., & Veseth, M. (2008). *Introduction to International Political Economy*. Prentice Hall: Pearson.
- Bank Indonesia. (2009). Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. *Outlook Ekonomi Indonesia 2009 - 2014*
- Bateman, M. (2010). *Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism*. London: Zed Books Ltd
- Callinicos, A. (2002). Marxism and Global Governance. Dalam D. Held, & A. McGrew, *Governing Globalization: Power Authority, and Global Governance*. Cambridge: Polity Press.
- CGAP. (2018). Global Bodies and Financial Inclusion. [gcap.org: http://www.cgap.org/topics/global-bodies-and-financial-inclusion](http://www.cgap.org/topics/global-bodies-and-financial-inclusion)
- Chiwira, O., Tadu, R., & Muyambiri, B. (2013). Financial inclusion and financial stability: the important role of financial regulation in explaining the relationship. Empirical review. *Journal of Research in International Business and Management (ISSN: 2251-0028) Vol. 3(4)*
- de Sousa, M. M. (2016). Financial Structure, Regulation and Inclusion: An Empirical Study across Developing Economies. Dalam C. R. Walter, *Global Financial Governance Confronts the Rising Powers*. 2016: McGill-Queen's University Press.
- Detik Finance. (2009, April 15). *Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global*. Detik Finance: <https://finance.detik.com/moneter/d-1115753/kronologi-dan-latar-belakang-krisisfinansial-global>
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 4*
- G20foundation. (2017). What is G20. [g20foundation.org: https://www.g20foundation.org/g20/what-is-the-g20/](https://www.g20foundation.org/g20/what-is-the-g20/)

- G20Toronto. (2017). The Group of Twenty: A History. G20 Toronto: www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf
- Hickel, J. (2015, Juni 10). *The microfinance delusion: who really wins?* The Guardians: <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/10/the-microfinance-delusion-who-really-wins>
- McKay, J. (2008). Reassessing development theory: 'Modernization' and beyond. Dalam D. Kingsbury, J. McKay, J. Hunt, M. McGillivray, & M. Clarke, *International Development Issues and Challenges Second Edition 2nd Edition*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Khan, H. R. (November 2011). Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin? *BANCON*.
- Virgianita, A. (2013, September 17). *G20 declaration: Whose agenda is it?*. The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/17/g20-declaration-whose-agenda-it.html>
- Wahid, N. (2014). *Kuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan - Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- World Bank. (2018). <http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/region/europe-and-central-asia>